

ISSN : 1410-8755

Arthavidya

Jurnal Ekonomi

Universitas Wisnuwardhana Malang Fakultas Ekonomi

Analisis Tentang Sistem Ekonomi Pancasila
dan Demokrasi Ekonomi

Syarif Hidayattulah

Rasio Pembayaran Dividen (*Dividend Pay
Out Ratio*) Selama Periode Krisis Ekonomi
Pada Perusahaan Publik Indonesia

Sutrisno

Dampak Pengumuman *Right Issue* Terhadap *Return,
Abnormal Return* dan *Security Return Variability*

Harlendo

Analisa Expected Return Serta Faktor
yang Mempengaruhinya

Suhadak

Terakreditasi No. 23 a / DIKTI / Kep / 2004

Arthavidya

Tahun 6, Nomor 1, Maret 2005

Arth

JURNAL EKONOMI ARTHAVIDYA

Diterbitkan oleh

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG

Jurnal Ekonomi ARTHAVIDYA Telah Terakreditasi Sebagai Jurnal/Majalah Ilmiah Terhitung Sejak Tanggal 4 Juni 2004 Berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor 23a/DIKTI/Kep/2004 Dengan Peringkat B

Pelindung

Rektor UNIDHA Malang
DR. H. Suko Wiyono, S.H., M.H.

Pengarah

Dekan Fakultas Ekonomi
Drs. Harlendo, M.M.

Ketua Penyunting

Drs. Supriyanto, M.M.

Penyunting Pelaksana

Drs. Mugianto, S.E., M.Si.
Drs. H. Mulyoso YS., S.E., M.Si.
Endang Sungkowati, S.Pd., M.Si.
Drs. S. Soedewo AP., M.M.

Penyunting Ahli

Prof. Santoso Budiman
Prof. DR. Salladien
Prof. DR. JG. Nirbito, M.Pd

Mitra Bestari

DR. Supramono, M.BA (Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga)
DR. Ujianto, M.S. (Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya)

Penyunting Tamu

Drs. Nurhadi, M.M. (Universitas Negeri Yogyakarta)
Drs. Priyono, M.M. (Universitas Gresik)

Staf Administrasi

Luqman Hakim, S.Pd.
Eko Indrayanto

Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Fakultas Ekonomi Universitas Wisnuwardhana Malang,
Jl. Danau Sentani 99 Malang Kotak Pos 25. Telp. (0341) 713604. Fax. (0341) 713603

Jurnal *Ekonomi Arthavidya* Universitas Wisnuwardhana Malang menerima sumbangan tulisan yang belum diterbitkan di media cetak lain. Naskah diketik sesuai dalam lembar bagian dalam sampul jurnal ini. Tulisan yang masuk dievaluasi oleh penyunting pelaksana. Penyunting dapat melakukan perubahan untuk keseragaman format pada

Jurnal diterbitkan di bawah pembinaan: **Rektor UNIDHA** Malang (DR. H. Suko Wiyono, S.H., M.H.). **Pembantu Rektor I** (Ir. Sony Leksono, S.E., M.S.). **Pembantu Rektor II** (Drs. Suharto SM. M.Pd., M.M.) **Pembantu Rektor III** (Drs. Yuhdi Batubara, S. H., M.H.), dan **Dekan** Fakultas Ekonomi (Drs. Harlendo, MM).

JURNAL EKONOMI ARTHAVIDYA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG
TAHUN 6, NOMOR 1, MARET 2005

DAFTAR ISI

- Priyono* Analisis tentang Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Kajian Ekonomi Makro Indonesia, 1
Rahayu Pudji Suci
- Nurul Muddarisna* Program Kemitraan Usaha Bersama Pertanian sebagai Jembatan dalam Pengembangan Agribisnis di Masyarakat, 12
- Ambar Sutjahjanti* Analisis Strategi Pemasaran Berdasarkan Kepuasan Konsumen terhadap Kualitas Layanan Jasa Perbankan Pada Bank "X" di Malang, 25
- Suhadak* Analisa *Expected Return* serta Faktor yang Mempengaruhinya, 41
- L. C. A. Robin J.* Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan dan Perilaku Individu terhadap Persepsi Kualitas Pelayanan pada Sektor Publik di Kabupaten dan Kota Propinsi Kalimantan Timur, 56
- Reikman A.* Indonesian Ownership Structure and Financing Choices, 66
- Hero Priono* Pengaruh Pelatihan dan Pelibatan Karyawan terhadap Kinerja Manajer pada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, 79
- Pudjoadi* Peranan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis, 99

- M.Hariyadi E.R.* *H. Satuki* Kepemimpinan dan Lapisan Tengger di Daerah Bromo, 123
- Caesarita W.* *Earnings Management* dan Asimetri Informasi pada saat IPO, 148
- Yayuk Ngeti R.* Pengaruh Kepuasan Gaji Terhadap Intensi Keluar, Kepuasan Kerja dan Komitmen Afective Sebagai Moderating Variabel, 169
- Endar Pituringsih* Kebijakan Dividen dalam Perspektif Agency Theory, 186
- Harlendo* Dampak Pengumuman *Right Issue* terhadap *Return*, *Abnormal Return* dan *Security Return Variability*, 203
- Sutrisno* Rasio Pembayaran Dividen (*Dividend Pay Out Ratio*) selama Periode Krisis Ekonomi pada Perusahaan Publik di Indonesia, 217
- M. Setyabuddhi* Analisa Efisiensi Pemasaran Pembenihan Udang Windu (*Penaeus Monodon*) di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukulilo Kotamadya Surabaya, 239
- Mudji Rahayu* Tinjauan Yuridis tentang Badan Hukum Bentuk Yayasan dalam Teori dan Praktik, 249
- Soffia Pudji E.* Pengaruh Penggunaan Rasio Keuangan terhadap Investasi Saham Perusahaan Manufaktur di BEJ, 262
- Saiful Anwar* Pengambilan Keputusan Auditor dalam Situasi Konflik Audit suatu Kasus, 272
- Endang K.* Manajemen Pendidikan Mampu Meningkatkan Ekonomi Usaha Kecil, 292

KATA PENGANTAR

Syarif H. Analisis Tentang Sistem Ekonomi Pancasila dan Demokrasi Ekonomi, 305

Qurotu Aini Analisis Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran Pakaian Batik Jadi di Jawa Timur, 314

Malang, Maret 2025

Karya Penyunting

Jurnal Ekonomi ARTHAVIDYA

KATA PENGANTAR

Jurnal Ekonomi Arthavidya, Tahun 6, Nomor 1, Maret 2005 hadir kembali dengan sejumlah artikel baik artikel konseptual maupun artikel laporan hasil penelitian. Artikel laporan hasil penelitian pada terbitan kali ini mendominasi isi jurnal, khususnya laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan perkembangan dan permasalahan pasar modal di Indonesia.

Penulis artikel berasal dari berbagai kalangan akademisi (dosen) yang tersebar dari perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Hal ini menunjukkan besarnya minat kalangan akademisi (dosen) dalam bidang penulisan karya ilmiah. Dewan penyunting sangat mengharap partisipasi para penulis artikel untuk berpartisipasi dalam jurnal.

Semoga tulisan dalam edisi Jurnal Ekonomi Arthavidya kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Malang, Maret 2005

Ketua Penyunting

Jurnal Ekonomi ARTHAVIDYA

Analisis tentang Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Kajian Ekonomi Makro Indonesia

Priyono
Rahayu Pudji Suci

Abstract: In respect to the relation of market mechanism and government roles in macro economy, we will certainly come to John Maynard Keynes's theory stating that, "economy when it is 'down' cannot be recovered by the market mechanism, but there must be an external force intervening, in this case government, to strengthen and improve aggregate demand. Keynes believes also that the government plays role in combating inflation rate and unemployment, and that monetary and fiscal policies must be used for managing macro economy. Nevertheless, the occurrence of stagflation had proved that Keynes' theory was powerless in handling with the problems of macro economy. Stagflation was featured with the high prices in concomitant with the increase of unemployment rate. What happened in Indonesia?"

Key words : market mechanism, government, macro economy.

Isu kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), membuat masyarakat dan pasar menjadi gerah. Ancang-ancang pasar untuk menaikkan harga barang-barang kebutuhan pokok mulai bergema. Kenaikkan BBM, yang diperkirakan akan naik 40% (Republika, 01 Desember 2004:1), tentu saja akan berakibat naiknya harga sejumlah barang kebutuhan pokok di pasaran dan tarif angkutan umum. Jasa angkutan umum, selain menjadi alat transportasi rakyat kecil juga sebagai alat pengangkut barang-barang kebutuhan pokok tersebut.

Dalam permasalahan kebijakan ekonomi, selalu ada peran pemerintah di dalam mempengaruhi pasar, yaitu apabila pasar menunjukkan kegagalan dalam mengendalikan harga, terjadi "*spill over*" (pelampauan atau pelonjak-

Drs. Priyono, MM adalah mahasiswa Program Doktor PPS Universitas Negeri Malang

Dra. Rahayu Pudji S., MM adalah dosen FE Universitas Widyagama Malang

harga) yang bisa merugikan masyarakat. Kadang-kadang pemerintah terpaksa mengambil kebijakan yang tidak populis karena tidak punya pilihan lain. Wapres memperkirakan kenaikan akan terjadi pada awal 2005 yang bisa saja mencapai 40% dari harga sekarang (Republika, 01 Desember 2004: 1). Selanjutnya, Wapres beralasan subsidi BBM dari Rp. 70 Triliun menjadi Rp. 25 Triliun pada 2005. Di APBN 2004, subsidi BBM hingga 23 Nopember 2004 mencapai Rp. 46 Triliun atau 77,8% dari target sebesar Rp. 59,2 Triliun. Sedangkan asumsi harga minyak mentah diperkirakan akan naik dari 36 dolar AS per barel menjadi 37,6 dolar AS per barel. Sebetulnya presentase kenaikan akan dicabut atau diturunkan jumlahnya.

Sedangkan pengurangan subsidi BBM itu tergantung pada asumsi harga minyak mentah dunia yang dipakai oleh pemerintah. Saat ini Indonesia mengimpor minyak mentah untuk diolah di kilang-kilang BBM dalam negeri. Indonesia, di samping mengimpor BBM untuk memenuhi konsumsi dalam negeri yang terus meningkat. Dengan demikian, kenaikan harga minyak mentah mengakibatkan dana subsidi BBM membengkak.

Posisi Indonesia sekarang yang berubah dari negara net eksportir minyak menjadi net importir minyak, kenaikan lonjakan harga minyak dunia membuat pemerintah mengalami kesulitan dalam RAPBN 2005. Pada tahun 1997 produksi minyak mentah Indonesia pernah mencapai hampir 1,7 juta barel per hari, tertinggi sepanjang sejarah perminyakan Indonesia (Sanusi, 2004:5). Kenyataan sekarang impor BBM untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri terus meningkat. Jika harga minyak dunia tahun 2005 akan terus di atas prediksi 37,63 atau di atas 40 dolar AS per barel, sedangkan harga minyak per barel dalam RAPBN 2005 dipatok hanya 24 dolar AS, maka jika harga BBM tidak dinaikkan dan berbagai anggaran belanja negara tidak disusutkan, defisit anggaran pasti melonjak. Ini adalah tantangan berat bagi pemerintahan baru sekarang ini. Jika tidak ada *windfallprofit* (laba yang tak terduga, yang terjadi dengan tiba-tiba akibat suatu kejadian yang tidak dikendalikan oleh orang atau perusahaan yang menarik keuntungan dari kejadian kenaikan BBM) maka rasanya pesimis harga minyak dunia bisa mencapai 24 dolar AS.

Kasus penetapan harga BBM ini merupakan contoh adanya intervensi pemerintah terhadap harga pasar. Intervensi pemerintah dibolehkan selama kondisi memungkinkan Pemerintah kadang-kadang menetapkan suatu harga

maksimum atau upah minimum melalui undang-undang yang dikeluarkannya. Subsidi BBM merupakan suatu cara untuk mengatasi keadaan, dimana ditempuh mekanisme subsidi yang tidak berdasarkan harga pasar. Tetapi permasalahan alokasi subsidi BBM adalah, subsidi yang dialirkan yang semula bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat tidak mampu, dalam kenyatannya banyak masyarakat yang mampu secara ekonomi masih menikmati subsidi tersebut. Keadaan ini sering kali menimbulkan kecurangan dan kejengkelan para konsumen maupun pedagang. Hilangnya jatah minyak tanah dari peredaran karena ulah para tengkulak yang sengaja memborong dengan mengambil jatah yang bukan haknya, sehingga harga menjadi naik, kemudian muncul pasar-pasar gelap yang melakukan penjualan secara ilegal. Tanpa adanya toleransi dan kejujuran dari masyarakat, situasi ini akan menjadi lebih buruk.

Namun demikian, campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar, seringkali merupakan cara yang tidak efisien untuk memperbaiki distribusi pendapatan. Samuelson & Nordhaus (1994) menyatakan bahwa bentuk distribusi pendapatan yang diinginkan akan dapat tercapai secara lebih efisien melalui penggunaan sistem perpajakan untuk mendistribusikan pendapatan dari pada melalui intervensi dalam pasar. Selanjutnya dua orang ahli ini, Samuelson & Nordhaus, berpendapat, kalau masyarakat mau selalu menggunakan jumlah pajak redistribusi untuk mempertahankan distribusi pendapatan yang optimal, maka persaingan bebas bisa diharapkan akan dapat menyelesaikan masalah. Namun permasalahannya, apakah masyarakat kita sekarang sudah menjadi pembayar pajak yang baik dan penggunaan pajak yang baik? Demikian juga, pemerintah sebagai pelayanan masyarakat dan penarik apakah sudah berfungsi dengan baik?

Sebenarnya Samuelson & Nordhaus (1994) pun berpendapat bahwa pandangannya itu bersifat amat kontroversial. Dan tidak ada jawaban yang pasti tentang sampai seberapa jauh intervensi pemerintah dapat dibenarkan.

Stabilisasi harga dengan menyerahkan pada mekanisme pasar, dengan menggunakan analisis permintaan dan penawaran sebagai basis untuk menganalisis berbagai hal penting kadang-kadang juga berdampak negatif bagi masyarakat. Harga suatu jenis barang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran atas barang yang tersedia dan disepakati oleh pembeli dan penjual. Inilah yang disebut sebagai harga keseimbangan (*equilibrium price*). Harga ini akan terus bergerak turun atau naik tergantung pada berubahnya permintaan dan penawaran atas barang tersebut. Kenaikan dari barang

apapun, termasuk valuta asing (valas) di pasar uang, dapat terjadi karena adanya kenaikan permintaan yang relatif besar dibandingkan kenaikan penawaran, atau bisa juga karena turunnya penawaran yang relatif besar dibandingkan dengan penurunan permintaan. Situasi inilah yang menyebabkan harga-harga terus bergerak naik.

PERAN PEMERINTAH DALAM PASAR UANG

Dalam konteks pasar valas, ada beberapa faktor yang memicu meningkatnya permintaan. *Pertama*, valas karena keperluan impor. *Kedua*, untuk pembayaran utang luar negeri baik oleh pihak pemerintah maupun perusahaan. *Ketiga*, adanya investasi perusahaan atau individu ke luar negeri. *Keempat*, adanya dorongan berspekulasi untuk menjaga kekayaan seseorang termasuk deposit di bank, tidak terkoreksi oleh adanya perubahan kurs. *Kelima*, masyarakat panik, demam artificial (*followen*) dari pasar di luar negeri (Rachbini, 2001).

Kebalikan dari hukum permintaan, hukum penawaran justru mengatakan adanya hubungan positif antara jumlah yang ditawarkan dengan harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasokan barang, dalam konteks valas ini adalah: (1) ekspor, (2) masuknya modal dari luar negeri berupa investasi langsung, pinjaman, hibah. Jika jumlah valas cukup besar (karena hasil ekspor) melebihi kebutuhan valas (untuk impor dan membayar utang), maka neraca pembayaran akan mempunyai cadangan devisa yang dalam hal ini akan dipegang oleh bank central maupun bank-bank dalam negeri. Cadangan devisa inilah yang akan dipakai sebagai alat intervensi di pasar valas untuk menjaga nilai kurs pada tingkat tertentu.

Jumlah cadangan devisa ini sering diukur dengan ukuran berapa lama cadangan ini mampu dipakai untuk menutup kebutuhan impor (di Indonesia mencapai rata-rata lima bulan, Rachbini, 2001:7). Tampaknya dengan masih lesunya perekonomian di Indonesia jumlah cadangan ini tidak cukup besar untuk menutup lonjakan permintaan. Akibatnya, pemerintah melepaskan batas intervensi dan membiarkan kurs bergerak sesuai mekanisme pasar, yaitu sesuai kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Selama pasokan valas di pasar masih belum mampu memenuhi kebutuhan permintaan dolar, selama itulah kurs akan terus bergerak naik. Demikian juga apabila permintaan terhadap dolar menurun maka gerakan terhadap kurs juga akan menurun.

PERAN PEMERINTAH DALAM PASAR TENAGA KERJA

Masalah yang cukup serius dihadapi pemerintah saat ini adalah masalah pengangguran. Jumlah pengangguran dalam berbagai jenisnya diperkirakan berkisar 40 juta orang, sedangkan yang betul-betul tidak bekerja (*open unemployment*) berkisar 10,8 juta. Pertambahan angkatan kerja (*labor force*) setiap tahunnya berkisar 2,5 juta jiwa (Arief, 2004). Daya serap pasar tenaga kerja yang kecil ini, disebabkan pertumbuhan ekonomi hanya berkisar 4 persen.

Faktor-faktor yang menyumbang pertumbuhan ekonomi atau kenaikan GDP riil adalah: (1) Kenaikan penawaran tenaga kerja, (2) Kenaikan modal fisik atau SDM, atau (3) Kenaikan produktivitas (jumlah produk yang diproduksi oleh masing-masing unit modal atau tenaga kerja).

Kenaikan Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja yang meningkat dapat menghasilkan keluaran (*output*) lebih banyak, tetapi jika stok modal tetap sementara tenaga kerja naik, maka tenaga kerja baru cenderung kurang produktif dibandingkan tenaga kerja lama. Penurunan produktivitas ini disebut dengan *diminshing return* atau hasil yang menurun. Hasil (per unit masukan) yang berkurang dapat juga terjadi jika stok modal bertumbuh lebih lambat dari angkatan kerja. Sepanjang perekonomian dan stok modal berkembang cukup pesat, tenaga kerja yang baru masuk tidak akan menggusur tenaga kerja yang lain.

Kenaikan Modal Fisik dan Modal SDM

Kenaikan stok modal fisik dapat juga menaikkan keluaran, walaupun tidak disertai oleh kenaikan modal tenaga kerja. Modal fisik menaikkan baik produktivitas tenaga kerja maupun menyediakan secara langsung jasa yang bernilai (Case & Fair, 2002). Sementara itu keadaan kelesuan ekonomi di Indonesia yang semakin pulih hal ini dilihat dari prediksi Bank Indonesia (dalam Tuhardjo, 2004:7) bahwa perkembangan berbagai indikator ekonomi makro yang relatif stabil dalam tahun 2003 diperkirakan akan terus berlanjut pada 2004. situasi sosial politik dan keamanan yang relatif stabil dan cukup kondusif, juga akan memperbaiki kinerja ekonomi. Perkembangan yang membaik tersebut telah mendorong semakin pulihnya kepercayaan masyarakat termasuk investor baik domestik maupun internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia. Dengan adanya investasi masuk yang semakin baik akan mengakibatkan bertambahnya perusahaan/pabrik dibangun, sehingga

dapat menyerap tenaga kerja yang identik dengan mengatasi pengangguran. Investasi swasta telah menjadi suatu kebutuhan utama untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran dan merupakan pendorong akselerasi pemulihan ekonomi di masa datang.

Di satu pihak modal tenaga kerja (SDM) kita harus diperbaiki kualitasnya dengan berbagai cara, antara lain dengan melalui pendidikan, pelatihan, program perbaikan kesehatan dan sebagainya. Semuanya itu dilakukan dalam rangka untuk memperbaiki produktivitas.

Kenaikan Produktivitas

Pertumbuhan ekonomi juga dapat dijelaskan dengan adanya kenaikan produktivitas masukan, yaitu setiap unit masukan tertentu memproduksi banyak keluaran. Sedangkan produktivitas tenaga kerja adalah keluaran per jam tenaga kerja atau jumlah keluaran yang diproduksi oleh tenaga kerja atau jumlah keluaran yang diproduksi oleh tenaga kerja di Indonesia, banyak peran pemerintah dalam bentuk-bentuk kebijakan seperti diterapkannya peraturan K3 (Keamanan dan Kesehatan Kerja) yang mewajibkan perusahaan-perusahaan melindungi tenaga kerja dengan lebih baik atas kecelakaan dan masalah kesehatan, AMDAL juga merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh perusahaan/pabrik untuk mengatur mutu limbah industri agar selain tidak merusak kesehatan tenaga kerja juga tidak merusak lingkungan industri. Bentuk peran pemerintah yang lain adalah penetapan upah minimum dan jaminan sosial.

Mengenai sistem pengupahan pada dasarnya mengandung tiga prinsip: (1) pemberian imbalan atas nilai pekerjaan, (2) penyediaan insentif, dan (3) jaminan kebutuhan hidup buruh (Simanjuntak, 1982). Selanjutnya Simanjuntak menyatakan bahwa untuk negara berkembang seperti Indonesia dimana produktivitas tenaga kerja masih rendah, sistem pengupahan perlu berfungsi sosial dan ekonomis. Dengan fungsi sosial berarti dan ekonomis. Dengan fungsi sosial berarti, sistem pengupahan harus dapat menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Fungsi ekonomis berarti upah yang diterima oleh setiap buruh harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya supaya produktivitas kerjanya dapat ditingkatkan. Sehubungan dengan pendapat atas maka konsekuensinya adalah perlunya penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup minimum (KHM) pekerja, seperti contoh di bawah ini.

Tabel di bawah hanya sebagai gambaran perbandingan antara upah minimum dan KHM. Ternyata upah minimum pada semua propinsi pada waktu itu masih jauh lebih rendah dari KHM kecuali untuk sektor perikanan di Kalsel dan sektor pertambangan minyak dan gas di Kaltim. Perbedaan tersebut akan lebih besar terhadap buruh yang bekerja tidak dibayar berdasarkan 30 hari kerja (tabel di atas dianggap tiap orang dibayar 30 hari kerja per bulan). Ini menandakan cita-cita kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya belum sepenuhnya terjamin pelaksanaannya melalui pengupahan tersebut. Kritik tentang penerapan upah minimum biasanya datang dari para pengusaha. Dengan alasan yang sama para ahli ekonomi juga tidak sependapat dengan gagasan upah minimum ini. Mereka cenderung untuk menganjurkan supaya upah diserahkan pada mekanisme pasar atau upah minimum ditekan serendah mungkin. (Simanjuntak, 1982). Selanjutnya Simanjuntak berpendapat bahwa implikasi ditetapkannya UMR untuk negara yang kaya penduduk seperti Indonesia akan mengakibatkan bertambahnya pengangguran. Dengan adanya UMR, terdapat sebagian pekerja yang memperoleh upah yang lebih besar dibandingkan kinerja yang dihasilkan, ini merugikan pemilik perusahaan, sementara biaya produksi semakin bertambah.

Tabel 1 Perbandingan upah minimum dan KHM (Rp)

Daerah (Tahun, Sektor) 1	Upah Per Hari	Upah Per Bulan	KHM Per Orang Per Bulan
Sumatera Utara (1980)	540	16.200	27.714
Riau (1980, bangunan)	750	22.500	40.122
Jambi (1981, perikanan)	1.200	36.000	28.532
Sumsel (1980, percetakan)	1.000	30.000	30.222
Lampung (1980, panglong kayu)	600	18.000	29.630
DKI Jaya (1980)	600	18.000	29.355
Jabar (1980, tekstil)	675	20.250	27.780
Jateng (1981)	325	9.750	24.532
Bali (1981)	650	19.500	30.956
NTB (1980, Instalatur)	700	21.000	23.580
NTT (1981)	500	15.000	35.160
Kalsel (1981, penebangan kayu)	1.250	37.500	32.980
Kaltim (1981, minyak)	1.350	40.500	34.831
Sulut (1981, perak, kelapa)	750	22.500	27.123

Sumber: Simanjuntak, (1982: 24) mengutip dari Depnakertrans

Untuk melangsungkan kehidupan perusahaan biasanya pemilik hanya punya dua alternatif pemecahan, yaitu memPHK yang berarti menambah pengang-

guran, dan menaikkan harga jual barang yang diproduksi yang berarti dapat menimbulkan inflasi dan notabene upah secara riil tidak naik.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas perlunya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perusahaan selain kebijakan pemerintah yang mendukung dalam rangka meningkatkan produktifitas pekerja. Bagaimana dengan peningkatan produktivitas pegawai negeri dengan sistem gajinya, dimana penerimaan gaji tidak disesuaikan dengan prestasi kerjanya?

KESIMPULAN

Antara mekanisme pasar dan peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi makro memang bukan tanpa kendala. Peran pemerintah selalu diperlukan apabila situasi dianggap memungkinkan, yaitu pada saat pasar menunjukkan kegagalan dalam mengendalikan harga sehingga terjadi "spill over" yang bisa merugikan masyarakat. Kadang-kadang pemerintah harus mengambil kebijakan untuk intervensi karena memang tidak ada pilihan, sudah tentu akan membuat kesulitan keuangan negara, apalagi alokasi subsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Tetapi jika harga BBM dinaikkan akan memicu kenaikan inflasi karena harga-harga naik dan meningkatkannya ongkos produksi. Inflasi juga akan menaikkan suku bunga sehingga belanja atau konsumsi rumah tangga menjadi menurun. Padahal konsumsi rumah tangga ini menyumbang banyak pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena pengurangan subsidi harus disesuaikan dengan seberapa besar presentase subsidi BBM yang akan dicabut atau diturunkan jumlahnya dan kemudian meninjau kembali atau menyempurnakan sistem alokasi dan besarnya subsidi yang adil dan benar (tepat sasaran). Sebagian pembiayaan subsidi bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Untuk meningkatkan cadangan devisa, pemerintah perlu membuat kebijakan yang menunjang perbaikan kinerja ekspor, antara lain dengan diversifikasi produk dan diversifikasi pasar untuk meningkatkan daya saing perekonomian negara. Menurut Zulkiflimansyah (2004), Indonesia telah kehilangan daya saing ekonomi. Penyebab utamanya adalah: (1) munculnya negara-negara lain seperti Vietnam dan Cina sebagai pesaing serius dalam ekspor produksi tradisional seperti tekstil, garmen, alas kaki (*footwear*), dengan produk yang lebih murah dan berkualitas, (2) ketidakmampuan produksi kita untuk menekan biaya produksi karena sangat tergantung pada bahan baku impor dan biaya siluman, (3) ekspor Indonesia hanya tergantung pada hanya

beberapa komoditas saja (plywood, garmen, tekstil, alas kaki, barang elektronik) yang hanya mampu melakukan penetrasi pada pasar yang terbatas (AS, Jepang, Singapura), (4) Indonesia tidak memiliki barang modal sehingga peralatan dan mesin sangat tergantung pada kebutuhan impor, (5) tidak berhasil melakukan pendalaman teknologi ke arah teknologi menengah dan tinggi dalam produk-produk yang kita impor, (6) budaya perakitan (*assembly production*).

Dari permasalahan di atas, agar Indonesia dapat meningkatkan daya saing ekonomi, perlu ditempuh cara-cara: (1) menyediakan produk yang berkualitas dan menerapkan budaya kualitas/mutu, (2) mulai mengurangi ketergantungan akan kebutuhan bahan baku impor dengan berusaha memanfaatkan dan menggali bahan baku alam dan daerah di Indonesia untuk menghasilkan produk-produk yang bisa bersaing di pasaran, (3) perlu diversifikasi pasar dan produk dengan menjalin hubungan dagang dengan negara-negara lain, (4) menggalakkan kegiatan penelitian dan pengembangan produk berteknologi menengah dan tinggi, (5) mengurangi dan menghilangkan budaya perakitan.

Untuk pasar tenaga kerja, Indonesia perlu meningkatkan kualitas SDM yang merupakan sumber produksi rumah tangga dan perusahaan, dengan melalui perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan produktifitas kerja. Berdasarkan sumber dari Litbang Diknas, hasil studi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, data dari tahun 1983 sampai dengan 2002, untuk semua propinsi di Indonesia diperoleh hasil kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah pendidikan rata-rata tenaga kerja (20%) terbesar kedua diperoleh dari pertumbuhan rata-rata pendidikan penduduk (19%), ketiga, diperoleh dari pertumbuhan investasi modal fisik per tenaga kerja (4%), sisanya 30% berdasarkan berbagai faktor lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi seperti pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan kemajuan teknologi (Ghozali, 2004). Selain peningkatan kualitas SDm, juga perlunya penerapan secara konsisten dan bertanggung jawab terhadap peraturan pemerintah yang menyangkut AMDAL dan K3. Kemudian yang terakhir perlu penyempurnaan penetapan standar UMR yang adil dan mensejahterahkan masyarakat pekerja.

Tentang masalah kebijakan UMR, alternatif lain yang bisa ditempuh pihak perusahaan adalah melakukan subsidi silang dengan jalan memperkecil perbedaan upah minimum dan upah maksimum, dengan demikian yang

berpenghasilan tinggi mensubsidi yang berpenghasilan rendah. Atau dalam bentuk pinjaman kepada pemerintah untuk melakukan program peningkatan produktifitas pekerja. Semnata dengan berjalannya program tersebut, produktifitas diharapkan terus meningkat, disisi lain UMR tetap dijalankan. Seiring dengan berjalannya waktu, hasil peningkatkn produktifitas pekerja sudah bisa menutup biaya program yang diperoleh dari pinjaman. Akhirnya kesimpulan adalah penetapan UMR hendaknya didasarkan dan disesuaikan dengan KHM agar para pekerja bisa menikmatinya dan meningkatkan kualitas hidupnya sehingga produktifitas kerja bisa meningkat.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, I. 2004. *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- Case, K.E & Fair, R.C. 2002. *Principles of Economics*. New Jersey: Prentice Hall
- Ghozali, A. 2004. *Studi Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Kumpulan Abstrak Makalah Konaspi V, 93
- Lembaga Penelitian Ekonomi IBII. 2002. *Makro Ekonomi Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Mubyarto. 2001. *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- M. Achmad, Antoni, K. 2003. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Gita Media Press
- Rachbini, DJ.I. 2001. *Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Republika, 1 Desember 2005. *Kenaikan BBM Diperkirakan Akan Naik 40%*, Hlm.1
- Samuelson, P.A & Nordhaus, W.D. *Ekonomi, Ed. Ke 12, Jilid 2*. Alih Bahasa : Khalid, A.Q. 1994. Jakarta: Erlangga.
- Samuelson, P.A & Nordhaus, W.D. *Ekonomi, Ed. Ke 12, Jilid 1*. Alih Bahasa : Wasana, Jaka. 1997. Jakarta: Erlangga.
- Sanusi, Bachrawi, 6 September 2004. *Migas Melukai RAPBN 2005*. Opini Republika Hlm. 5
- Simanjuntak, Payaman. 1982. *Sumber Daya Manusia . Kesempatan Kerja dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, UI.

- Tuhardjo. 2004. *Kebijakan PMA dan PMDN, Perkembangan dan Dampaknya*. Makalah disajikan dalam Seminar Ekonomi Makro Lanjut. Fakultas pasca Sarjana Program Studi S3 Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Malang, November 2004.
- Zulkilimansyah, 1 Oktober 2004. *Presiden Baru dan Ekonomi*. Opini, Republika Hlm 5.